

BAB III

SANKSI EMBARGO MINYAK AMERIKA SERIKAT

Peningkatan program nuklir yang terus dikembangkan Iran memang membawa situasi perekonomian lebih baik. Tetapi seiring berjalannya waktu program nuklir yang dikembangkan Iran mendapat banyak respon dari dunia internasional dan sempat menjadi isu cukup hangat di dunia internasional. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman dunia internasional. Kekhawatiran Amerika Serikat akan terciptanya senjata nuklir Iran yang dapat mengancam keamanan dunia internasional sudah ditanggapi oleh pemerintahan Iran pada masa Ahmadinejad yang mengatakan bahwa program nuklir Iran hanya untuk tujuan damai dan kesejahteraan masyarakat Iran.

Adanya Resolusi DK PBB juga menambah tekanan terhadap Iran atas berlangsungnya program nuklir. Resolusi-resolusi yang diterapkan memastikan bahwa program nuklir yang dikembangkan adalah tujuan damai semata. Upaya ini dilakukan juga karena tidak ada hasil yang pasti dari IAEA yang sebelumnya telah melakukan inspeksi ke Iran terkait program nuklir yang dikembangkan Iran. Tetapi, belum menemukan titik terang akan status program nuklir tersebut.

A. Program Nuklir Iran

Pada dasarnya, program nuklir yang dikembangkan oleh Iran memiliki beberapa tujuan penting sekaligus sangat strategis Iran dalam persaingan di kawasan Timur Tengah. Alasan dan tujuan Iran dalam mengembangkan program nuklirnya: pertama, untuk menguatkan basis ekonomi Iran selain dalam bidang ekspor minyak dan gas. Kedua, teknologi nuklir yang dikembangkan sebagai *bergaining power* Iran dikawasan Timur Tengah terhadap Israel yang sangat menentang program nuklir Iran. Ketiga, teknologi nuklir sebagai momen yang menunjukkan bahwa Iran juga patut diperhitungkan keberadaan dan kekuatannya di kawasan maupun di dunia internasional.

Awal dari program nuklir Iran dimulai sejak tahun 1921-1979 yaitu di masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran sudah mulai mengembangkan kekuatan militernya dan juga melakukan pengembangan program nuklir. Iran mulai melakukan kegiatan program nuklirnya pada tahun 1960. Pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, program nuklir Iran tidak pernah mendapatkan penentangan ataupun gangguan dari Amerika Serikat karena pengembangan dan pembangunan nuklir, apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Iran kala itu dianggap tidak mengancam kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Disamping itu secara historis hubungan kedua negara pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi masih sangat erat. Pemimpin Iran Shah Reza Pahlevi sangat pro dengan Amerika Serikat, itu semua dapat dilihat dari sikapnya yang selalu menerima semua proposal yang masuk ke Iran terkait proyek-proyek kepentingan Amerika Serikat di negara para mullah ini. Salah satu dari sekian banyak proposal

yang diajukan Amerika Serikat adalah mengenai pembangunan reaktor nuklir Iran. Berdasarkan proposal yang diajukan Amerika Serikat, Shah Iran berencana akan membangun program reaktor-reaktor nuklir sebanyak 23 unit yang akan tersebar diseluruh wilayah Iran (Sahini, 2010).

Pada tahun 1977, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat. Hal ini sesuai seperti yang disampaikan oleh Wakil Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mr. Sydney Sober, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran adalah mitra yang terus mengalami peningkatan dalam hubungan kerjasama. Dia juga mengatakan bahwa dalam pemerintahan Shah Iran ini akan membeli 8 reaktor nuklir dari Amerika Serikat yang akan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik (Spector, 1990).

Pemerintahan Shah Iran juga banyak mendapatkan bantuan berupa bahan-bahan uranium dari Afrika Selatan. Pada tahun 1970-an menurut Dr. Akbar Etemad seorang pendiri sekaligus Presiden pertama badan energi atom Iran 1970-1978, pusat penelitian nuklir Iran (TNRC) yang melakukan percobaan *pengexytrasian plutonium* dengan bahan-bahan kimia lainnya. Percobaan ini merupakan keinginan Shah Iran sebagai langkah awal dalam upaya pembuatan senjata nuklir Iran. Shah Iran sangat menginginkan Iran sebagai negara yang memiliki senjata nuklir (Sahini, 2010).

Setelah Revolusi, tepatnya pada tahun 1979 utamanya ketika hubungan kedua negara semakin memburuk dan setelah Amerika Serikat secara resmi memutuskan hubungan dipomatik, posisi Amerika Serikat berubah haluan dengan menentang segala hal berkaitan pengembangan teknologi nuklir Iran. Impian dari Shah Iran

untuk membangun proyek ambisius nuklir nya sirna dengan revolusi besar-besaran yang terjadi. Revolusi Iran 1979 menyebabkan banyak hambatan terkait proyek nuklir misalnya di Buser. Pembangunan proyek tersebut belum terselesaikan dan terpaksa dihentikan pasca revolusi Iran.

Kemudian pada masa Pemerintahan Rafsanjani 1997-2005 program nuklir Iran dilanjutkan atas tiga alasan pokok yaitu pertumbuhan penduduk, perkembangan pesat industri dan peyusutan suku cadang minyak, karena dalam waktu 25-30 tahun ke depan pemerintah Iran memprediksi akan terjadi ledakan penduduk yang cukup tinggi mampu mencapai dua kali lipat. Selain peningkatan populasi penduduk Iran, pemerintahan Rafsanjani memulai kembali pengembangan program nuklir yang sempat terhenti sebelumnya. Rafsanjani mulai melakukan pendekatan kembali dengan Krafwerke Union Jerman untuk menyelesaikan proyek reaktor Bushehr yang sempat terhenti. Tetapi upaya tersebut tidak berjalan lancar, masih adanya tekanan-tekanan dari Amerika Serikat yang menghambat penyelesaian dari reaktor Bushehr. Iran tetap sulit mendapatkan komponen-komponen reaktor nuklir Buserhr.

Pada tahun 1997 di Iran, Mohammad Khatami menggantikan Rafsanjani. Di era Khatami, Iran terbukti terus melanjutkan program nuklirnya dengan adanya laporan dari Intelejen AS pada bulan Agustus 2002 bahwa Iran telah membangun fasilitas pengayaan uranium di Natanz, sekitar 200 mil arah selatan Tehran. Program nuklir Iran terus dilanjutkan pada masa pemerintahan presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2005. Perkembangan program ini semakin meningkat, dimana Iran melakukan pengayaan salah satu bahan nuklir (Uranium) mencapai 20% melewati

level kesepakatan dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) yang seharusnya setiap negara memiliki 5 %.

Pengembangan nuklir Iran merupakan langkah alternatif untuk mengurangi krisis sumber daya energi yang sedang dialami Iran. Energi nuklir ini dinilai lebih murah, luas, dan lebih efektif jika dibandingkan dengan energi-energi yang lain (Avoy, 2004). Oleh karena itu, Iran terus meningkatkan nuklir. Pengembangan nuklir ini sangat menguntungkan bagi Iran tetapi justru Iran mendapat tekanan dari dunia internasional terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Tuduhan terhadap Iran bahwa program nuklir ini akan mengancam keamanan dunia internasional karena memungkinkan Iran untuk membuat dan mengembangkan senjata nuklir. Melihat permasalahan ini semua, Iran tentunya mencari cara agar dunia internasional percaya bahwa program nuklir Iran ini hanya bertujuan untuk damai dan kesejahteraan rakyatnya.

Pada Februari 2003 IAEA merencanakan untuk melakukan kunjungan inspeksi ke Iran. Kunjungan inspeksi tersebut direncanakan sebagai reaksi atas semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap program nuklir Iran (Reuters, 2003). Kunjungan inspeksi terhadap fasilitas nuklir Iran tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Presiden Khatami dengan Kepala IAEA Mohammad El-Baradei. Dalam pertemuan tersebut pemerintah Iran setuju untuk memberikan informasi pendahuluan mengenai rencana pengembangan fasilitas nuklir baru. Presiden Khatami juga berharap laporan pendahuluan tersebut akan menjembatani kesalahpahaman yang terjadi tentang tujuan dari program nuklir Iran yang banyak disalah artikan oleh negara-negara Barat. Selain itu, kunjungan

tersebut untuk melihat perkembangan program nuklir Iran yang telah menjadi kontroversi dunia internasional, dimana Iran melakukan perkembangan program nuklir yang telah melewati batas kesepakatan yang mencapai 20%.

Amerika Serikat meyakini bahwa Iran telah melakukan program nuklir dalam pencapaian Bom Nuklir dimana akan mengancam Dunia. Oleh karena itu Amerika Serikat mulai melakukan serangkaian sanksi dan embargo yang menjatuhkan sektor ekonomi Iran. Tahun 2012, Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan sanksi embargo minyak bumi terhadap Iran yang terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012. Sanksi ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat telah mempengaruhi perekonomian Iran (Upi, 2012).

Selain melalui sanksi, indikator hubungan semakin memburuk juga dapat dilihat melalui persepsi ancaman oleh Amerika Serikat. Persepsi ancaman tersebut terlihat dari beberapa pernyataan dari Pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya adalah pernyataan yang dikeluarkan pada bulan Mei 2009 oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat "terganggu" oleh kunjungan-kunjungan Iran ke Amerika Latin (Hakim, 2012).

Persepsi Iran sebagai ancaman utama juga datang dari para kepala mata-mata dan badan intelijen Amerika Serikat. Kepala mata-mata Amerika Serikat dan ahli intelijen tersebut datang dan berkumpul bersama-sama dalam sebuah sidang setiap tahunnya untuk berbagi tebakan terbaik mereka tentang ancaman terbesar yang akan dihadapi negara di tahun mendatang. Dalam sidang persepsi ancaman tahunan yang diadakan di Kongres, pejabat intelijen Amerika Serikat menunjuk

beberapa ancaman utama yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Iran menjadi satu-satunya negara yang menjadi ancaman utama bagi Amerika Serikat. Persepsi tersebut didasari oleh anggapan mereka bahwa Iran akan tetap membuka peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan senjata nuklir (Mulrine, 2012).

Selain melalui persepsi dari Pemerintah Amerika Serikat, kepala mata-mata dan badan intelijen, persepsi Iran sebagai ancaman dan musuh nomor satu Amerika Serikat juga diperlihatkan oleh persepsi rakyat Amerika Serikat yang diperoleh melalui jajak pendapat. Menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2007, Iran menjadi *top enemy* bagi Amerika Serikat. Hasil didasarkan pada wawancara telepon dengan 1.007 warga Amerika Serikat yang berusia 18 tahun keatas. Jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 1-4 Februari 2012 tersebut menempatkan Iran pada posisi teratas dengan perolehan 26% suara. Sedangkan Irak memperoleh 21% suara dan Korea Utara sebanyak 18% suara (Saad, 2007).

Sanksi yang diberlakukan kepada Iran bukan merupakan sanksi pertama kali dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah pernah melakukan beberapa sanksi sebelumnya. Pertama kali dilakukan pada tahun 1980 dengan melarang kegiatan bisnis dan individu Iran untuk melakukan kerjasama dengan Iran kecuali mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2008 Amerika Serikat melakukan pembatasan keuangan dengan melakukan pelarangan kepada bank-bank Amerika bertindak sebagai perantara dana ke dan dari Iran. Pada Juli 2010, dibuat undang-undang yang berisi larangan pasokan bahan bakar minyak

yang sangat diperlukan untuk bahan produk olahan Iran, dan menghukum kelompok-kelompok asing yang melakukan investasi ke Iran. Kemudian, pada bulan November 2011 Amerika Serikat memberikan sanksi kepada individu yang mendukung pengembangan sektor minyak Iran. Pada Desember 2011, membekukan aset lembaga keuangan asing yang berhubungan dengan Bank Sentral Iran dalam kaitan di sektor minyak (Atmaja, 2013).

Amerika Serikat memberikan sanksi berupa paket sanksi financial. Sanksi yang di berikan oleh AS dan sekutunya (eropa dan Israel) atas Iran karena tidak ingin menghentikan pengembangan program nuklir. Sebenarnya, isu nuklir Iran ini sudah lama menjadi isu politik didunia terutama negara Barat. Melimpahnya kandungan uranium di Iran yang merupakan bahan dasar dalam pengayaan nuklir di negeri para Mullah ini, Iran dicurigai telah dan akan membuat senjata nuklir yang akan mengancam dunia. Namun Iran membantah semua tuduhan tersebut, Iran melakukan pengayaan uranium bahan nuklir nya hanya untuk tujuan perdamaian.

Perkembangan program nuklir Iran ternyata memberikan respon negatif dari Amerika Serikat dan Negara sekutu. Amerika Serikat menganggap nuklir Iran akan menjadi ancaman bagi dunia dan Amerika Serikat khususnya, itu terlihat dari upaya Amerika Serikat menjatuhkan sanksi embargo minyak terhadap Iran. Diberlakukannya sanksi tersebut oleh Amerika Serikat sangat memberikan dampak buruk bagi perekonomian Iran.

Dalam sebuah berita online dituliskan bahwa Kongres Amerika Serikat tengah menimbang sanksi ekonomi yang lebih berat bagi Iran. Partai Republik percaya bahwa sanksi ekonomi yang lebih kuat akan mampu menjatuhkan perekonomian

dan dapat mengasingkan Iran dari dunia perdagangan global. Dengan begitu, secara otomatis langkah ini akan membuat Iran untuk menghentikan perogram nuklir mereka.

Kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan sanksi embargo minyak semakin kuat dengan mendapat dukungan dari negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara lainnya. Negara-negara Eropa juga memberikan perlakuan yang sama berupa sanksi ekonomi dengan tidak lagi melakukan impor minyak dari Iran. Kebijakan itu diikuti oleh beberapa negara lainnya. Tetapi, masih ada beberapa negara yang tetap melakukan impor minyak dari Iran. Tidak semua setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara eropa terhadap Iran. Ada negara yang menentang kebijakan tersebut yaitu negara Yunani, dikarenakan situasi dari negara tersebut sedang mengalami krisis serta ketergantungan impor minyak dari Iran.

B. Sanksi Dewan Keamanan PBB

Amerika Serikat merupakan negara utama dalam segala macam upaya penjatuhan sanksi kepada Iran melalui Dewan Keamanan PBB. Berawal dari latar belakang historis Revolusi Islam Iran tahun 1979 merupakan salah satu peristiwa besar yang mengganggu kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, dengan demikian dapat dikatakan hampir tidak terdapat faktor kepercayaan dalam hubungan kedua negara tersebut.

Amerika Serikat meyakini bahwa tujuan akhir dari pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh Iran adalah terciptanya senjata nuklir pemusnah massal

yang akan mengancam keamanan dunia, sekaligus merupakan ancaman terhadap sistem perekonomian dan politik yang sedang berjalan. Sejak penolakan resmi pemerintah Iran terhadap proposal yang diajukan oleh negara-negara Barat pada Agustus tahun 2006, perwakilan Amerika Serikat di PBB John Bolton segera memulai pendekatan-pendekatan secara intensif untuk mendorong negara-negara Eropa agar menyetujui penerapan sanksi yang lebih berat untuk Iran melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (Daily, 2008).

Pada tahun 2002 program nuklir Iran mulai menjadi sorotan dan menjadi masalah dunia internasional, Amerika Serikat dan UE3 (Inggris, Perancis, Jerman) kembali terlibat aktif dalam proses negosiasi dan diplomasi untuk meminta Iran menghentikan program nuklir dengan alasan kekhawatiran bahwa program nuklir Iran merupakan upaya untuk menutup-nutupi keinginan Iran untuk menciptakan senjata nuklir. Proses negosiasi dan diplomasi antara Iran dengan UE3 tidak berjalan sesuai dengan keinginan UE3 ataupun Amerika Serikat sendiri yang memang tidak terlalu terlibat langsung dalam perundingan tersebut. Mengingat adanya hubungan diplomatik dan relasi yang kurang baik antara Iran dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat lebih banyak terlibat dalam upaya untuk meyakinkan negara-negara UE3 agar sejalan dengan keinginan mereka yaitu menjatuhkan sanksi kepada Iran. Terutama agar membawa masalah program nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB dengan tujuan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Iran (Ingram, 2006). Upaya Amerika Serikat untuk meyakinkan UE3 agar membawa program nuklir Iran menjadi krisis internasional yang dibahas dalam

Dewan Keamanan PBB, dapat dikatakan cukup berhasil dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 dan 1737 pada tahun 2006, 1747 pada tahun 2007 dan 1803 pada tahun 2008.

Sebelumnya IAEA sudah melakukan inspeksi terlebih dahulu atas program nuklir yang dikembangkan Iran. Namun, Amerika Serikat dan UE3 melalui Dewan Keamanan PBB menjelaskan bahwa mereka belum yakin dan puas terhadap IAEA yang telah melakukan inspeksi secara menyeluruh dan menjamin bahwa program nuklir yang dikembangkan Iran cukup transparan meskipun dalam beberapa laporan temuan IAEA dari November 2003 secara konsekuen menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya aktifitas militer yang berkaitan dengan program nuklir Iran, walaupun memang potensi akan hal tersebut cukup besar terjadi (Ingram, 2006).

Dewan Keamanan PBB kemudian meminta Iran agar menghentikan semua hal aktifitas yang berkaitan dengan pengayaan dan proses pembuatan bahan uranium, termasuk aktifitas riset dan pengembangan. Iran hanya diberikan waktu selama satu bulan untuk melakukan hal tersebut oleh Dewan Keamanan PBB. Jika itu semua tidak dilakukan oleh Iran maka akan mendapatkan sanksi ekonomi dan sanksi diplomatis. Itu sudah tertuang dalam Resolusi 1696 tahun 2006 Dewan Keamanan PBB. Adanya resolusi tersebut mendapat banyak dukungan dimana ada 14 negara yang mendukung sekali resolusi tersebut, tapi ada satu negara yang tidak setuju yaitu negara Qatar.

Negara Qatar menyatakan bahwa Dewan Keamanan sebaiknya memberikan kesempatan kepada Iran dengan batas waktu tertentu untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari IAEA mengenai program nuklirnya. Mengingat Iran

hanya terlambat beberapa hari dalam menyelesaikan jawaban dan bahwa secara prinsipil Iran menyetujui paket konsesi yang ditawarkan oleh negara-negara Barat.

Resolusi 1696 ini juga menyatakan bahwa upaya penghentian aktifitas pengayaan nuklir, itu semua sebagaimana bentuk kepatuhan sepenuhnya negara Iran terhadap ketentuan yang diberlakukan oleh IAEA, dapat menghasilkan suatu solusi negosiasi dan diplomasi yang menjamin bahwa program nuklir Iran adalah benar untuk tujuan damai bukan sebagai ancaman (UN.org, 2008). Lebih jauh, Resolusi 1696 dapat dikatakan merupakan hasil dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan UE3, yang menginginkan pemberhentian total dari peningkatan program nuklir Iran, dengan ancaman dijatuhkannya sanksi apabila Iran tidak mematuhi resolusi tersebut.

Perwakilan Iran di PBB yaitu Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa program nuklir Iran bukanlah merupakan suatu ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia internasional seperti apa telah yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu,, penanganan permasalahan program nuklir Iran dengan membawanya ke dalam Dewan Keamanan PBB ini justru dipandang tidak perlu dan seharusnya tidak dilakukan, itu semua hanya akan menghambat proses negosiasi saja. Zarif juga menyatakan bahwa satu-satunya alasan adalah karena Iran memutuskan untuk mengakhiri proses negosiasi dengan UE3 setelah selama dua tahun tidak menghasilkan kerangka penyelesaian yang konstruktif, mengaktifkan kembali pelaksanaan program nuklir damai yang merupakan hak yang sah dengan secara bertahap membuka kembali fasilitas nuklirnya dan mengakhiri penundaan yang telah dijalankan secara sukarela. Resolusi 1696 (2006) juga

dianggap mengabaikan addendum dari laporan IAEA 2005 IAEA *Safeguards Implementation Report*, dikeluarkan pada Juni 2006 yang menyatakan bahwa terdapat 45 negara lainnya yang memiliki kategori yang sama dengan Iran, termasuk 14 negara Eropa dan beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB (Ingram, 2006).

Di satu sisi, karena memandang Resolusi 1696 (2006) sebagai suatu hal yang tidak objektif dan adil karena tidak menyoroti negara-negara lain dengan kondisi serupa dengan Iran, Iran tetap melaksanakan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan program nuklirnya. Sementara itu Dewan Keamanan PBB yang didominasi oleh negara-negara Barat memiliki pandangan bahwa Resolusi 1696 (2006) tidak efektif dijalankan oleh Iran sehingga membutuhkan sanksi yang lebih berat.

Pada bulan Desember 2006 Dewan Keamanan PBB dalam sidangnya yang ke 5612 memutuskan untuk memberlakukan Resolusi 1737 (2006) yang diarahkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran berupa pelarangan aktifitas impor dan ekspor dari material-material yang digunakan dalam program nuklir Iran, dan juga membekukan aset finansial dari individu atau entitas yang memiliki keterlibatan dalam proses pengayaan Uranium. Dewan Keamanan PBB secara kolektif memberlakukan Resolusi 1737 (2006) dan mewajibkan Iran untuk menghentikan semua aktifitas yang berkaitan dengan pengayaan dan menghentikan program pembangunan reaktor air berat untuk kemudian akan dilakukan verifikasi oleh IAEA terhadap seluruh aktifitas tersebut.

Dewan Keamanan PBB secara spesifik juga memutuskan bahwa semua negara agar menghentikan pasokan, penjualan atau transfer, yang dapat digunakan atau

ditujukan bagi Iran, atau peralatan dan perlengkapan serta teknologi, aktifitas pengayaan, atau pengembangan sistem persenjataan nuklir. Dewan Keamanan PBB juga mewajibkan IAEA untuk memberikan laporan mengenai apakah Iran telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diharuskan dalam Resolusi sesuai jangka waktu yang diberikan selama 60 hari (News, 2008).

Dalam Annex Resolusi 1737 (2006), juga dicantumkan perusahaan, instansi, maupun individu yang diduga kuat memiliki keterlibatan dalam program nuklir Iran. Tujuan dari dicantumkannya nama-nama tersebut adalah agar negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB khususnya dan PBB pada umumnya, dianjurkan untuk menghentikan atau membatalkan segala jenis kegiatan terkait perdagangan dan pengadaan atau pemindahan aset-aset yang memiliki keterkaitan dengan program nuklir Iran.

Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB menerapkan sanksi berdasarkan keputusan sebelumnya untuk memberlakukan pelarangan ekspor senjata dari Iran dan menekankan pembekuan aset finansial terhadap 28 individu ataupun instansi. Setelah proses negosiasi yang berjalan panjang dan sulit, naskah resolusi juga mempertimbangkan dan memasukan pendapat-pendapat dari beberapa negara seperti Afrika Selatan, Indonesia dan Qatar yang sebagian besar menyatakan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi NPT memiliki hak sah untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk Iran (GlobalPolicy, 2007). Resolusi tersebut juga mencantumkan mekanisme negosiasi dengan Iran di masa yang akan datang, sekaligus sebuah referensi untuk Kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir.

Pada tahun 2007, karena menilai Iran tidak menerapkan resolusi-resolusi sebelumnya, Dewan Keamanan PBB kembali menjatuhkan sanksi baru yang lebih ketat melalui resolusi 1747 (2007) yang disetujui oleh Perancis, Jerman, dan Inggris. Resolusi ini memutuskan agar Iran dengan segera menghentikan seluruh kegiatan pengayaan, termasuk penelitian dan pengembangan, untuk kemudian diverifikasi oleh IAEA. Dewan Keamanan juga meminta agar Dirjen IAEA menyerahkan laporan mengenai penghentian penuh kegiatan pengayaan Iran, dalam jangka waktu 60 hari. Resolusi 1747 (2007) juga menjelaskan bahwa penghentian kegiatan pengayaan oleh Iran sebagaimana tercantum dalam resolusi sebelumnya yaitu 1737 (2006), demikian halnya dengan verifikasi seluruh kegiatan pengayaan Iran oleh IAEA, dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencarian solusi negosiasi diplomatik sekaligus memberikan jaminan bahwa program nuklir Iran memang benar memiliki tujuan damai (UN, 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Keamanan juga menekankan akan pentingnya peran positif komunitas internasional untuk terus mengupayakan solusi tersebut, dan berupaya untuk mendorong Iran agar membangun komunikasi dan kerjasama dengan IAEA, dan juga meyakinkan bahwa membangun kerjasama dan komunikasi dapat memberikan manfaat bagi Iran.

Menanggapi resolusi 1747 (2007) tersebut, dalam sidang Dewan Keamanan PBB Menteri Luar Negeri Iran Manoucher Mottaki, menyatakan bahwa Dewan Keamanan dibawah dominasi dan tekanan dari sebagian kecil anggota permanennya telah melakukan penilaian dan tindakan yang tidak adil dan tidak perlu terhadap program nuklir Iran yang bertujuan damai dan tidak mengancam

perdamaian dunia, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Dengan demikian resolusi tersebut dianggap tidak sah karena berada diluar mandat resmi sebagaimana yang dirumuskan dalam piagam Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Mottaki juga menambahkan bahwa resolusi-resolusi tersebut tidak bisa mengindikasikan bahwa adanya kesepakatan diantara ke lima belas anggota Dewan Keamanan, karena terdapat desakan dan tekanan dari beberapa anggota permanen melalui kekuatan dan pengaruhnya terhadap anggota lainnya.

Pada bulan Maret 2008 dalam Sidang Dewan Keamanan PBB yang ke 5848, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 1803 (2008) dengan dukungan empat belas negara, dan satu negara anggota tidak tetap yaitu Indonesia abstain. Resolusi tersebut disahkan berdasarkan Pasal 41 Bab ke VII dari Piagam PBB (terkait batasan-batasan yang mengikat diluar Angkatan Bersenjata), yang memutuskan bahwa Iran diharuskan untuk menghentikan segala kegiatan pengayaan sesuai penjelasan disalah satu paragraph resolusi 1737. Resolusi 1803 ini merupakan resolusi yang dimaksudkan untuk memperberat penerapan sanksi terhadap Iran sehubungan penolakannya untuk menghentikan kegiatan pengayaan terkait program nuklirnya.

Dewan Keamanan juga meminta kepada semua negara untuk memberlakukan pengawasan dan pembatasan terhadap perpindahan dan pergerakan material yang digunakan dalam kegiatan pengayaan nuklir atau persenjataan nuklir, disekitar wilayahnya yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan Iran. Selain itu, Dewan Keamanan juga melakukan perpanjangan masa pembekuan aset-aset milik

perorangan atau institusi yang terlibat dan mendukung kegiatan terkait dengan program nuklir Iran, termasuk yang disebutkan dalam Annex I dan Annex II yang tercantum pada resolusi sebelumnya yaitu 1747 (2007), atau sebagaimana ketentuan Dewan Keamanan PBB. Menghimbau kepada seluruh negara agar memberlakukan pengawasan dan pembatasan aktivitas keuangan dengan institusi atau bank yang berdomisili di Iran, terutama dengan Bank Melli dan Bank Saderat.

Tentunya, akibat dari resolusi-resolusi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB membuat kondisi perekonomian Iran juga tersendat. Aktifitas perekonomian Iran juga terbatas, sehingga membuat situasi perekonomian Iran terus menurun dan semakin memburuk. Resolusi ini tidak terlepas dari upaya keras Amerika Serikat untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada Iran terkait program nuklir. Amerika Serikat sangat antusias dengan mencari dukungan ke beberapa Negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan tujuannya dalam menjatuhkan sanksi yang lebih berat untuk pemerintahan Iran.

C. Dampak Sanksi Embargo Minyak Terhadap Iran

Upaya peningkatan program nuklir yang dilakukan Iran tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Justru membawa Iran kepada situasi yang sangat terpuruk dalam hal perekonomiannya. Perekonomian Iran mulai jatuh setelah resmi diberlakukannya sanksi embargo minyak oleh Amerika Serikat. Embargo minyak yang ditujukan kepada Iran dengan cepat menurunkan produksi dan transaksi ekspor minyak Iran.

Amerika Serikat juga memberikan sanksi berupa embargo terhadap perekonomian Iran yaitu larangan untuk melakukan kerjasama dengan bank, asuransi dan PMA dalam sektor gas dan minyak bumi Iran, yang sudah ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB kepada Iran. Sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap perekonomian Iran.

Dalam hal makro ekonomi Iran seperti hutang luar negeri, investasi asing, ekspor impor memiliki dampak yang buruk setelah adanya sanksi embargo Amerika Serikat. Pada hutang luar negeri Iran, terus mengalami penurunan disetiap tahun nya setelah adanya sanksi Amerika Serikat. Upaya Iran tersebut berhasil ditengah tekanan yang ada. Seperti dikutip dari salah satu media informasi, Direktur Bank Sentral Iran mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Bank Sentral Iran mampu memangkas hutang luar negeri Iran dari sekitar 45 milyar dolar menjadi 35 milyar dolar pada tahun 2013. Meskipun, pendapatan negara terus berkurang akibat sanksi embargo minyak tapi Bank Sentral Iran mampu mengontrol permintaan dan dengan menciptakan pusat transaksi valas, dapat memenuhi kebutuhan impor (Radio, Iran Indonesia, 2013).

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam investasi asing di Iran. Meskipun dalam tekanan sanksi Amerika Serikat, pemerintahan Iran tetap menjaga kestabilan investasi asing Iran yang terus meningkat mencapai 1,8 miliar tahun 2011 menjadi 3,4 miliar pada tahun 2012 meningkat sebesar 140%. Investasi asing Iran masih kuat dengan industri minyak dan gas. Dimana banyak investor asing yang terus melakukan investasi ke Iran dalam industri minyak bumi dan gas. Investasi asing Iran akan terus meningkat jika sudah dicabutnya sanksi embargo tersebut. Para

investor akan semakin meningkat masuk ke Iran, perdagangan akan terus berkembang dan tentunya akan membuat ekonomi Iran cepat kembali normal (JPNN.COM, 2015).

Selanjutnya, dalam hal ekspor impor Iran pasca diberlakukannya sanksi embargo minyak oleh Amerika Serikat dan sekutu menjadi semakin terbatas. Dimana banyak nya negara-negara di Eropa yang sebelumnya melakukan impor minyak dari Iran tidak lagi melakukan impor karena sanksi tersebut. Banyaknya negara yang memutuskan impor minyak dari Iran ini tentu berdampak sekali pada perekonomian mereka yang sangat menyandarkan diri pada pendapatan utama salah satunya sektor minyak. Melihat kondisi ini tentunya Iran mencoba mencari cara untuk terus dapat bertahan dan akhirnya tetap melakukan ekspor ke negara-negara lain terutama dikawasan Asia yang masih menerima dan membutuhkan minyak dari Iran. Kemudian, iran juga sulit melakukan impor terutama dalam hal kebutuhan pokok dan pangan mereka. Karena adanya ancaman dari negara yang melakukan sanksi terhadap negara yang bersangkutan agar tidak lagi mengekspor bahan-bahan pokok ke Iran.

Tahun 2012, sejak diberlakukan sanksi embargo minyak, Iran mengalami berbagai macam kesulitan salah satunya dalam mengimpor bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, pakan ternak, dan teh dari negara para mitra dagangnya seperti Malaysia dan Thailand. Kemudian, ditahun yang sama dikutip dari salah satu berita mengenai mata uang Iran, yaitu Rial kehilangan nilai. Nilai tukar satu Dolar kini 35.000, sementara sembilan bulan lalu masih 20.000 Rial.

Selanjutnya, para pedagang di ibukota Teheran melaporkan mengenai berkurang drastisnya kemampuan beli warga di Iran.

Selanjutnya, masih ditahun yang sama menurut Menteri Keuangan Amerika Serikat Jack Lew Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Iran turun hingga 20% sejak diberlakukan embargo. Penyusutan itu turut memukul dan berdampak pada sektor swasta juga. Bank-bank di Iran mesti menanggung peningkatan kredit macet menjadi 15-30 persen. Banyak pegawai-pegawai di Iran tidak menerima gaji. Sebagian mesti mengalami penundaan panjang gaji. Amerika Serikat mengklaim pengangguran di Iran juga terus meningkat yaitu mencapai 20% meski pemerintah hanya mengaku angka 13%. Kesepakatan sementara memperingan sanksi Iran pada 2014. Akibatnya, ekonomi negara itu tumbuh hingga 1-1,5 persen berdasarkan data *International Monetary Foundation* (Variaid, 2015).

Menteri Keuangan Iran juga menyatakan bahwa Iran telah kehilangan pemasukannya sebesar US\$160 juta dari penjualan minyak sejak tahun 2012 (Indonesia C. , 2015). Tentunya jumlah tersebut tidak sedikit, sangat berdampak buruk bagi situasi perekonomian Iran. Kita ketahui, bahwa minyak sebagai salah satu pendapatan utama Iran justru mengalami pengurangan sangat drastis. Selanjutnya, sanksi juga mengakibatkan nilai mata uang rial Iran turun hingga 56 persen di pasar gelap pada Januari 2014 dibanding Januari 2012. Dapat dilihat bahwa, setelah diberlakukannya sanksi embargo minyak oleh Amerika Serikat secara cepat membawa situasi perekonomian Iran yang semakin buruk. Tentunya ini semua yang diharapkan oleh Amerika Serikat melihat Iran mengalami krisis dan

akan menyerah, selanjutnya Iran akan mengikuti keinginan Amerika Serikat terkait program nuklir Iran.

Selama sanksi embargo masih diberlakukan oleh Amerika Serikat, tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bebas Iran untuk memainkan roda perekonomiannya. Meskipun adanya kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati sebelum adanya pencabutan sanksi secara resmi membuat sedikit ruang gerak bebas bagi Iran. Sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya ini membuat perekonomian Iran tidak stabil, inflasi terus meningkat, transaksi dengan bank internasional dilarang, serta nilai mata uang yang semakin rendah. Tidak hanya berhenti disitu saja, seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa tingkat pengangguran di Iran semakin meningkat.